

Tidak Mudah Kembali ke Naskah Asli UUD 1945

PURBALINGGA (KR) - Ketua MPR RI Bambang Susatyo menegaskan, upaya mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli sebelum amandemen sama sulitnya dengan saat mengamandemen. Prosesnya harus diawali dengan usulan sedikitnya sepertiga jumlah anggota MPR. Dengan usulan dan kajian pasal yang akan diubah dan saat bersidang harus memenuhi kuorum dua pertiga jumlah anggota.

”Sekalipun dari DPD kompak hadir semua, bila ada dua partai saja tidak hadir, sidangnya tidak bisa dilaksanakan,” tutur Bambang Susatyo saat ‘Sosialisasi Empat Pilar MPR’ di Gedung Partai Golkar Purbalingga, Jumat (17/11). Pernyataan Bamsut, sapaan akrab petinggi Partai Golkar itu menjawab pertanyaan wartawan terkait maklumat Dewan Presidium Konstitusi yang meminta sistem bernegara dikembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

Maklumat Dewan Presidium Konstitusi itu disampaikan Jenderal (Pur) TNI Try Sutrisno di gedung MPR/D-PR pada Jumat lalu (10/11). Saat diminta tanggapannya atas pernyataan Try Sutrisno yang menyebutkan perubahan UUD 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 terbukti secara akademik telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara dan menghilangkan Pancasila sebagai identitas konstitusi, Bamsut menolak berkomentar.

Sebelumnya, mantan presiden Try Sutrisno mewakili Dewan Presidium Konstitusi mendesak MPR menggelar sidang tunggal untuk mengembalikan UUD 1945 pada naskah sebelum amandemen. Tapi dengan tetap melaksanakan jabatan presiden selama dua periode atau 10 tahun. **(Rus)-f**

Peletakan Batu Pertama MIM Teladan

MAGELANG (KR) - Peletakan batu pertama pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Teladan Kota Magelang dilaksanakan di lokasi pembangunan di wilayah Jurangombo Selatan Kota Magelang, Sabtu (18/11). Di lokasi yang sama juga dilakukan launching program wakaf pengadaan tanah makam Muhammadiyah. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan secara bergantian, diawali Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH kemudian disusul lainnya, termasuk Kepala Kantor Kemenag Kota Magelang, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Magelang maupun lainnya.

Ketua PDM Kota Magelang Prof H Rifqi Muhammad MSc PhD mengatakan niatan semula tahun 2028 baru akan dimulai pembangunannya, namun hal itu dipercepat, diantaranya karena ada bantuan-bantuan sudah memberikan bantuan.

Nanti juga akan disengkuyung keluarga besar Muhammadiyah Kota Magelang untuk dapat diwujudkan. Estimasi untuk bangunan total luasnya sekitar 5.000 meter. Dikatakan juga, proses pembangunannya secara bertahap. Untuk tahap pertama dibangun 4 lantai, sekitar 800 meter. Yang di bagian depan untuk gedung utama, sehingga nanti secara bertahap.

Kepala MIM Teladan Kota Magelang Nina Agustina SPd diantaranya mengatakan MIM Teladan Kota Magelang dari tahun ke tahun semakin dipercaya masyarakat. Ini terlihat dari penambahan jumlah siswa yang semakin meningkat.

Bahkan untuk saat ini Gedung MIM Teladan di Kampus 1 sudah tidak mencukupi untuk menampung 265 siswa, sehingga ada 2 ruang kelas yang ditempatkan di luar gedung MIM Teladan Kota Magelang. **(Tha)-f**



KR-Thoha

Proses peletakan batu pertama pembangunan MIM Teladan.

Disbudpar Gelar Festival Pasar Agrowisata

SALATIGA (KR) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Salatiga menggelar Festival Pasar Agrowisata Sitalang, Kelurahan Kauman Kidul, Kota Salatiga, Sabtu (18/11). Pada festival ini juga diramaikan festival wong-wongan memedi sawah untuk mengusir burung yang mengganggu tanaman padi.

Festival ini dibuka Pj. Wali Kota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi dan Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit.

Acara ini selain bazar jajanan, uga diramaikan dengan Fashion Show Petani Millenial, penampilan Tari Rodhat Rosahaman, penampilan Drumblek, serta Penampilan hiburan musik.

Kadisbudpar Salatiga, Yayat Nurhayat mengungkapkan adanya festival ini tak hanya untuk hiburan saja, namun juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam UMKM maupun seni kebudayaan.

”Tujuan diadakannya Festival Pasar Sitalang adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan alam sekitar, memicu semangat kreatif POKDARWIS Sitalang,” kata Yayat Nurhayat. Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit menekankan jika Sitalang bisa menjadi satu potensi wisata yang harus dikembangkan dengan baik sehingga hasilnya bagus.

”Yang harus dikembangkan di sini bukan hanya orang tanam padi, bukan potong padi, bukan yang seperti seperti itu saja, tapi ada magnet-magnet lain yang, membuat orang bukan hanya satu kali datang tapi bisa dua kali dan mengajak Meng-endorse orang lain untuk datang. sehingga bisa kita perlihatkan kepada wisatawan yang datang bahwa ini memang destinasi agro terbaik,” kata Dance.

Sedangkan Pj Walikota Salatiga, Sinoeng berharap sinergitas dapat lebih terjalin di acara-acara yang akan diadakan selanjutnya, tidak hanya dengan stakeholder lokal, namun juga dengan stakeholder nasional. **(Sus)-f**

TNI/Polri dan ASN Dinilai Masih Jaga Netralitas

BOYOLALI (KR) - Sese-puh Boyolali sekaligus Dewan Kehormatan DPC PDIP Kabupaten Boyolali, Seno Kusumoarjo menyebut, perkembangan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang sampai saat ini baik dari kalangan polisi, TNI serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali masih dianggap netral.

”Sampai hari ini, di Boyolali kalau saya melihat Polisi, TNI dan ASN masih tetap netral. Kami juga berharap, mereka terus tetap netral dalam pilpres nanti,”katanya kepada wartawan Jumat(17/11). Menurut Seno Kusumoarjo atau yang lebih dikenal dengan nama Seno Gedhe, pada politik tahun ini sudah banyak masyarakat yang cerdas untuk menentukan pilihannya.

Pihaknya, juga tidak menggubris terkait adanya serangan politik melalui media sosial(medsos) jenis Tik Tok oleh perempuan berseragam ASN baru baru ini.

”Masyarakat sekarang itu

sudah pada cerdas dalam menentukan pilihannya. Kalau ada tuduhan, di Boyolali ada yang bilang ASN tidak netral, biasanya itu partai sebelah yang susah masuk ke Boyolali,” ujarnya. Terkait hal itu, pihaknya juga langsung menanyakan bupati terkait isu arahan ASN untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pilpres 2024 mendatang.

”Waktu saya tanyakan ke Pak Bupati, ia menjawab, bupati tidak pernah mengarahkan atau perintah ASN memilih ke Pak Ganjar. Bahkan, ASN tersebut tidak dikenalnya, bisa saja itu bukan ASN di Boyolali, kalau baju kan bisa dibeli di mana saja, atau bisa juga pinjam. Kami lakukan pengecekan terus,” terangnya. Menurutnya, mengupload di media sosial tersebut adalah bagian dari orang berpendapat dalam demokarsi. Namun, pihaknya meminta bahwa dalam berdemokrasi jangan sampai melakukan praktek yang kotor.

”Kami sudah tahu yang



KR-Mulyawan

Seno Kusumoarjo

aploud itu. Orangnya siapa saya sudah tahu. Namun, jangan berdemokrasi atau praktek yang kotor kotor

seperti itu. Silahkan, berpendapat dalam demokrasi,” jelasnya. Seno Kusumoarjo mengatakan, dengan

berseragam ASN tersebut seharusnya profesi yang dapat mendukung terhadap masyarakat, bukannya membuat keruh masyarakat.

”Ya, seharusnya kan berseragam ASN begitu mengedukasi masyarakat, bukan malah mempengaruhi suasana di masyarakat. Tapi kalau saya, terkait itu, PDIP Boyolali tetap tenang tenang saja, yang terpenting target kursi DPRD kabupaten 41 atau 43,”katanya.

Sementara itu, Bupati Boyolali M Said Hidayat mengatakan, bahwa terkait isi Tik Tok seorang berseragam ASN tersebut adalah tidak tahu menahu dan tidak pernah memerintahkan. ”Apakah kamu pernah mendengar terkait apa yang diisi Tik Tok ASN itu, apakah kamu mendengar kalau saya memerintahkan, belum pernah kan,”katanya. Bupati mengajak kepada masyarakat untuk bersama sama menyukkseskan pemilihan umum yang akan datang dengan cara yang baik baik. **(Mul)-f**

BKKBN Fokus Layani Unmet Need Pasangan Usia Subur

SEMARANG (KR) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) fokus melayani *unmet need* dengan sasaran 5,6 juta Pasangan Usia Subur (PUS) di Jateng.

Selain penyumbang lahirnya bayi stunting baru, *unmet need* juga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (Siga) BKKBN, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Jawa Tengah per September 2023 sebanyak 5.657.665. Dari jumlah itu, sebanyak 13,1 persen diantaranya adalah *unmet need*.

”Orang itu kalau ditanya apakah akan hamil lagi, jawabnya tidak. Terus ditanya pakai KB tidak? jawabnya juga tidak. Nah itulah yang namanya *unmet need*, tidak cocok antara kebutuhan dan kenyataan,” ungkap Kepala BKKBN RI Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo SpOG (K) pada kegiatan Workshop Strategi Penurunan *unmet need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan (14-15/11) di Kota Serang.

Hasto menjelaskan, perlunya mendekati golongan tersebut termasuk mendekati klinik melahirkan, Rumah Sakit, agar mereka memiliki PKBRS (Program Keluarga Berencana Rumah Sakit). Agar siapa saja yang melahirkan kemudian ditawarkan untuk menggunakan alat kontrasepsi, sehingga nantinya jarak kehamilan selanjutnya tidak terlalu dekat.

Ketidaksiapan dalam memberikan asupan gizi optimal kepada anak, kedewasaan yang belum matang, faktor ekonomi yang belum stabil, menjadi penguat terjadinya stunting. Semua itu terjadi manakala 4T, yakni Terlalu Muda untuk menikah dan melahirkan, Terlalu Tua melahirkan anak, Terlalu Banyak anak, dan Terlalu Dekat jarak kehamilan pertama dengan kedua dan seterusnya terjadi di masyarakat.

BKKBN menekan terjadinya 4T dengan berbagai program dan kolaborasi, salah satunya adalah dengan KBPP (KB Pasca Persalinan). Melalui Workshop Strategi

Penurunan *unmet need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan, bagaimana strategi dan upaya menekan *unmet need* serta meningkatkan KBPP kemudian dirumuskan.

Penyuluh KB Utama BKKBN Ir Siti Fathonah, MPH dalam presentasi materinya perihal Strategi Efektif dalam Upaya Penurunan *unmet need* dan Peningkatan KBPP mengungkapkan bahwa mayoritas alasan terjadinya *unmet need* adalah PUS yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Kemudian dibarengi masih tingginya mitos penggunaan alat kontrasepsi, juga kendala akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang menyediakan KB di daerah terpencil.

KBPP diyakini menjadi solusi efektif dalam menekan terjadinya *unmet need* di masyarakat. Maka sosialisasi, promosi dan edukasi tentang KB Pasca Persalinan harus terus disebar luaskan. ”Tantangan dan Kendala Pelaksanaan KBPP di antaranya minimnya pemahaman regulasi tentang KB Pasca Persalinan, masih banyak pula ibu hamil yang belum

sepenuhnya didukung keluarga untuk melakukan KBPP, belum optimalnya sosialisasi dan pra konseling di lapangan, juga belum optimalnya peng-input-an pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA),” papar Siti Fathonah.

Dari kondisi tersebut, Siti Fathonah kemudian memberikan alternatif strategi penanganan dengan memaksimalkan akses pelayanan KB yang berkualitas. Mengefektifkan komunikasi dan konseling. Fokus sasaran yang tidak hanya perempuan (istri), tapi juga laki-laki (suami). Serta kolaborasi dengan bentuk pelayanan lain yang fokus pada ibu dan anak.

Sementara itu Agoes Poedjianto, SH, M.Kes selaku Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Dan KB Pasca Persalinan di Perwakilan BKKBN Jawa Tengah mengatakan, dengan menurunnya *unmet need* serta tercapainya KBPP dengan maksimal, maka akan berimbas pada menurunnya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, termasuk akhirnya berimbas pada menurunnya kemiskinan ekstrim. **(Ati)-f**

Pj Bupati Diminta Awasi Pembangunan

BANYUMAS (KR) - Progres pembangunan SMP Negeri 10 Purwokerto, Banyumas yang berada di Jalan Mashuri Purwokerto Barat sudah mencapai 80 persen.

”Saat ini progres pembangunan mencapai hampir 80 persen,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Joko Wiyono saat melakukan peninjauan pembangunan bersama Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro, Jumat (17/11).

Joko menjelaskan nilai kontrak pembangunan tahap 1 sebesar Rp 7.719.-300.608,00. Dana tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas berasal dari dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2023.

Untuk pembangunan tahap pertama, meliputi gedung ruang kelas baru 12 kelas, pembangunan

gedung ruang guru, pembangunan ruang perpustakaan. Kemudian juga di lakukan pembangunan pagar dan gerbang depan, jalan akses dan halaman.

”Pembangunan menempati luas lahan 1,3 hektare, ditarget rampung pada akhir tahun ini,” jelas Joko.

Joko Wiyono menambahkan pemilihan lokasi, sudah di pertimbangkan secara matang. Di antaranya dari segi penduduk, akses keterjangkauan, lokasi yang strategis, kontur tanah, dan keamanan dari bencana.

”Selain itu, studi kelayakan memperlihatkan bahwa Kecamatan Purwokerto Barat memang perlu adanya penambahan SMP yang baru. Sebab, di wilayah tersebut hanya terdapat satu sekolah menengah pertama, yakni SMP N 4 Purwokerto,” ungkapnya.

Pj Bupati Banyumas

Hanung Cahyo Saputro kepada semua pihak, meminta agar ikut mengawasi jalanya pembangunan, agar semua dapat ber-

jalan sesuai aturan yang berlaku dan sesuai Perjanjian Kontrak.

Pada kesempatan ini Pj Bupati melihat dari dekat

pembangunan gedung ruang guru, pembangunan ruang perpustakaan dan gedung ruang kelas baru. **(Dri)-f**



Visitasi KIP Beri Nilai Sempurna Setwan DPRD Jateng

KOMISI Informasi Publik (KIP) Jateng melakukan visitasi ke Sekretariat DPRD (Setwan) Jawa Tengah Rabu (15/11). Dalam kunjungannya tersebut, rombongan komisioner KIP yang dipimpin oleh Sutanto, diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Jateng (Sekwan) Urip Sihabudin. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan pemeriksaan badan publik 20-23. Dalam pertemuan tersebut Urip Sihabudin



KR-Budiono

Urip Sihabudin

menyatakan tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan informasi publik sesuai standar yang ada kepada masyarakat Jawa Tengah.

Visitasi dinilai sangat bermanfaat bagi jajaran Setwan DPRD Jateng, karena mampu memicu jajaran di lingkup Setwan DPRD Jawa Tengah untuk semakin meningkatkan kinerjanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait program digitalisasi, ada beberapa capaian dan inovasi yang sudah dilakukan oleh Setwan DPRD Jawa Tengah, diantaranya, masih menduduki salah satu peringkat keterbukaan informasi publik yang digelar KIP setiap tahunnya dengan nilai yang terbilang

sangat memuaskan.

Pimpinan rombongan KIP Jawa Tengah Sutarto mengakui setwan DPRD Jateng telah memberikan hasil yang memuaskan dalam penilaian SAQ dan presentasi. Juga penilaian Visitasi Pengecekan yang dilakukan KIP memperoleh hasil yang maksimal dengan nilai sempurna. Dalam uji publik kedepan, diharapkan Setwan DPRD Jawa Tengah mampu memberikan Informasi sedetail-detailnya dan terpercaya kepada masyarakat guna penilaian akhir yang akan dilakukan nanti oleh KIP.

Dengan nilai maksimal yang diberikan KIP kepada Setwan DPRD Jateng, Urip mengaku serius dalam penyampaian uji publik yang akan dilaksanakan kedepannya.

Hal itu menjadi kebanggan bagi setwan karena kerjasama dan kerja keras antarpejabat dan staf yang terlibat membuahkan hasil yang memuaskan. **(*)-f**

(Disampaikan oleh Setwan DPRD Jateng Urip Sihabudin kepada wartawan KR Biro Semarang, Budiono Isman-Anf)



KR-Istimewa

Penjabat Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro didampingi Kepala Dindik Banyumas Joko Wiyono saat meninjau pembangunan SMP Negeri 10 Purwokerto.